

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATU BARA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2014-2029**

TESIS

OLEH

**S U W A R N O
NPM. 151801168**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINSTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATU BARA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2014-2029**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister
Administrasi Publik Dalam Program Studi Magister Administrasi Publik Pada
Program Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**S U W A R N O
NPM. 151801168**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINSTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara
Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029

Nama : Suwarno

NPM : 151801168

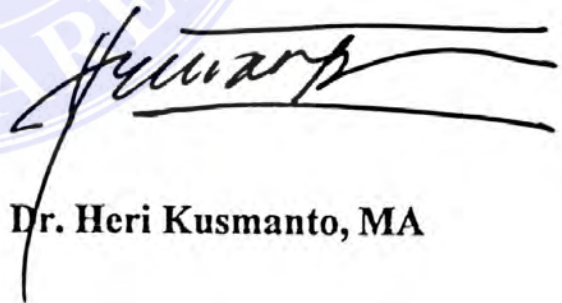
Menyetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si

Pembimbing II



Dr. Heri Kusmanto, MA

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/2/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Teloh diuji pada Tanggal 30 Agustus 2017

N a m a : Suwarno
N P M : 151801168



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Drs. Usman Tarigan, MS
Sekretaris : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si
Pembimbing II : Dr. Heri Kusmanto, MA
Penguji Utama : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/2/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/2/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2017

Yang menyatakan,



Suwarno

A B S T R A K

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2014-2029

N a m a : **S u w a r n o**
N P M : **151801168**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Pembimbing I : **Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si**
Pembimbing II : **Dr. Heri Kusmanto, MA**

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pelaksanaannya melibatkan tiga stakeholder kunci yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung yang sangat berarti terhadap pembangunan, karena melalui pariwisata dapat diperoleh dana dan jasa bagi pembangunan, diantaranya dapat dilihat dalam bentuk devisa, pajak dan retribusi yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Dalam perencanaan pengembangan suatu daerah, sektor pariwisata memberikan peranan besar terhadap peningkatan pendapatan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan dan program-program pembangunan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batu Bara dalam pembangunan kepariwisataan dan mengimplementasikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembangunan dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Batu Bara. Metode penelitian menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan suatu penelitian yang menganalisa tentang status suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 dalam program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, menunjukkan bahwa belum terpenuhi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta belum memadai sumber daya manusia dalam pengelolaan objek wisata.

kata kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pembangunan Pariwisata

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF BATUBARA REGIONAL REGULATION NUMBER 9 YEAR 2014 ABOUT MASTER PLAN OF REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT YEAR 2014-2029

Name : **Suwarno**
NPM : **151801168**
Study Program : **Master of Public Administration**
Supervisor I : **Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si**
Supervisor II : **Dr. Heri Kusmanto, MA**

The development of tourism sector is an integral part of national development which is in the implementation involves three key stakeholders namely government, private and public. The development of this sector is implemented cross-sectorally, involving many local, regional, national and even international institutions. Tourism is one of the significant supporting sectors to development, because through the tourism can be obtained funds and services for development, it can be seen in foreign exchange, taxes and levies obtained from companies engaged in tourism. In the planning of a region development, the tourism sector provides a big role to increase local revenue. This study aims to analyze the improvement and development programs that should be done by the Department of Tourism, Youth and Sports of Batu Bara to improve the Batubara tourism and to implement the factors that support or inhibit the improvement and development of tourism in Batu Bara. The research is using the qualitative method approach. The Qualitative research is a research that utilizes open interviews to examine and understand the attitudes, views, feelings, and behavior of individuals or groups of people. This research uses descriptive qualitative method which is analyze about the status of an object, a set of conditions, a system of thinking. The result of the research shows that Implementation of Regional Regulation of Batu Bara Number 9 Year 2014 on Master Plan of Regional Tourism Development Year 2014-2029 in public facility development program, public facility and tourism facility, shows that unfinished construction of public infrastructure, public facilities and tourism facilities as well Inadequate human resources in the management of tourism objects.

Keywords : *Policy Implementation, Local Regulation, Tourism Development*

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029”**. Tesis ini disusun sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan tesis ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si, sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Heri Kusmanto, MA, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Ishak, S.Pd, M.Si selaku Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batu Bara beserta staf atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan selama penulis mengadakan penelitian.
7. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf pengajar Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
8. Istri, Anak, Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa selama penulis menjalani masa pendidikan Strata 2 (S-2) di Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Medan, Juli 2017

Penulis,

Suwarno

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kebijakan Publik	9
2.2. Implementasi Kebijakan.....	13
2.3. Model Implementasi Kebijakan	15
2.4. Kebijakan Pembangunan Pariwisata	25
2.4.1. Pengertian, Objek, Azas dan Fungsi Pariwisata	25
2.4.2. Kebijakan Pariwisata	32
2.4.3. Pembangunan Pariwisata	34
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	39
3.2. Bentuk Penelitian.....	39
3.3. Teknik Pengumpulan Data	39
3.5. Variabel Penelitian	41
3.6. Teknik Analisis Data	43
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara.....	44

4.1.1. Letak dan Geografis	44
4.1.2. Demografis	47
4.1.3. Potensi Pariwisata Kabupaten Batu Bara	49
4.1.4. Profil Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Batu Bara...	54
4.2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.....	56
4.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi	56
4.2.2. Rincian Tugas	58
4.2.3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, PemudaOlah Raga	70
4.3. Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	70

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian.....	74
5.2. Karakteristik Responden	74
5.3. Variabel Penelitian	75
5.4. Implementasi Kebijakan.....	75
5.4.1. Komunikasi.....	76
5.4.2. Faktor Sumber Daya Manusia dan Dana.....	80
5.4.3. Faktor Kecenderungan-Kecenderungan	85
5.4.4. Struktur Birokrasi	86
5.5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi ImplementasiPeraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2014-2029	76
5.6. Dampak Implementasi Peraturan Daerah KabupatenBatu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana IndukPembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2014-2029Dalam program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.....	88
5.7. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk PembangunanKepariwisataaan Daerah Tahun 2014-2029 Dalam ProgramPembangunan Prasarana	

Umum, Fasilitas Umum Dan Fasilitas Pariwisata.....	94
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan.....	96
6.2. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pengembangan pariwisata tidak hanya pemerintah yang melakukannya sendiri tetapi pihak-pihak lain juga ikut andil dalam pembangunan infrastruktur pendamping, ini guna meningkatkan pendapatan dari sektor ekonominya. Menurut Charles Kaiser Jr. Dan Larry E. Helber dalam bukunya menjelaskan tingkat-tingkat perencanaan pariwisata itu dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. Setelah itu dilakukan, kita akan dapat melihat bagaimana perkembangan dari jumlah berkunjung wisatawan apabila ternyata mencapai target yang telah ditetapkan selanjutnya akan memikirkan sistem prioritas. Untuk pengembangan ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata yang ada (pemerintah dan swasta) dan pihak-pihak terkait yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah tersebut.

Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan bereksistensi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan

tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan. (*Deddy Prasetya Maha Rani Jurnal Politik Muda, Vol. 3 No. 3, Agustus-Desember 2014, 412-421*).

Pariwisata merupakan sektor yang kompleks karena pariwisata bersifat multidimensi, baik fisik, politik, sosial budaya dan ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah perlu diletakkan dalam perspektif pembangunan terpadu yang menuntut keseimbangan aspek-aspek potensi sumber daya alam, teknologi dan manajemen serta kemampuan sumber daya manusia sehingga dalam pengelolaan pembangunan ekonomi mempunyai sasaran yang terarah dengan prinsip efektifitas, efisiensi maupun kesinambungan.

Peluang sektor pariwisata cukup prospektif, karena selain sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata berpotensi untuk dapat menjadi pendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya, seperti sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, perindustrian dan jasa. Sektor pariwisata dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 pasal 4, menyebutkan mengenai tujuan Kepariwisataan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antarbangsa. Sangat jelas dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa sudah selayaknya sektor pariwisata diperhatikan karena akan membawa dampak yang luar biasa terhadap masyarakat dan perkembangan Negara ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029.

Arah pembangunan kepariwisataan daerah menjadi dasar kebijakan, strategi dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah yang meliputi pembangunan : Destinasi Pariwisata Daerah (DPD); Pemasaran Pariwisata Daerah; Industri Pariwisata Daerah; dan Kelembagaan Pariwisata Daerah.

Dan dengan diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah membawa paradigma baru pada sistem pemerintah yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Implikasi dari Undang-Undang tersebut dalam kegiatan perencanaan pembangunan adalah pengelolaan pembangunan daerah sebagai modal dasar dalam peningkatan perekonomian daerah.

Kabupaten Batu Bara berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 904,96 km² atau 90.496 Ha yang terdiri dari 7 kecamatan serta 151 desa/kelurahan defenitif. Letak geografis Kabupaten Batu Bara berada di 2⁰03'00" Lintang Utara dan 99⁰01-100'00" Bujur Timur. Adapun batas administrasi Kabupaten Batu Bara yaitu :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Serdang Bedagai
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Asahan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun
4. Sebelah Timur : Selat Malaka

Daya tarik wisata lain yang menonjol dan sangat layak untuk dikembangkan di Kabupaten Batu Bara adalah wisata pantai sepanjang pesisir timur kabupaten yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Beberapa destinasi wisata pantai yang ada di Kabupaten Batu Bara diantaranya Pantai Bunga; Pantai Alam Datuk; Pantai Perjuangan/Pantai Jono; Pantai Bunga Laut Indah; Waduk Indah dan Danau Laut Tador. Sementara untuk daya tarik buatan di Kabupaten Batu Bara dapat dikategorikan ke dalam kelompok wisata sejarah, diantaranya Istana Niat Lima Laras; Komplek Makam Raja Lima Laras; Kubah Datu Bara; Meriam Bogak; Meriam Namasiam; Komplek Masjid Padang Gennting; Meriam Simpang Dolok; Sumur Bor Simpang Dolok; Situs Pemakaman Masjid Lamo; Kompleks Makam Wan Alang; Benteng Jepang; Meriam Datuk Simuangsa; Istana Indrapura; Masjid Indrapura; dan Kompleks Makam Raja Indrapura.

Potensi pariwisata Kabupaten Batu Bara cukup banyak yang bervariasi merupakan objek dan daya tarik wisata yang belum dikelola secara profesional. Dan belum terpenuhinya pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Penataan dan peningkatan mutu dari objek dan daya tarik wisata mutlak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara bersama pihak swasta sehingga tercipta objek dan daya tarik wisata yang tertib, bersih, nyaman dan menyenangkan dengan dukungan keamanan yang mantap.

Kebijakan-kebijakan yang menyangkut perkembangan dan pembangunan pariwisata yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang tertuang didalam Rencana Strategis

(Renstra) maupun Rencana Kerja (Renja), yang mampu membawa kemajuan pada pembangunan pariwisata di daerah, mengingat Kabupaten Batu Bara merupakan Kabupaten yang memiliki potensi dalam sektor pariwisata. Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang bertujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh Instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Mustopadidjaja, 2002).

Melakukan pembangunan bisa diartikan juga dengan melakukan perubahan dari suatu kondisi atau keadaan tertentu menuju kearah yang lebih baik. Kata Pembangunan identik dengan bentuk fisik, tetapi pada dunia pariwisata, dalam membangun pariwisata bukan hanya kemajuan fisik objek wisata yang dibutuhkan, pembangunan sikap pelaku usaha wisata juga tidak kalah pentingnya, seringkali wisatawan ini kembali ke suatu daerah tujuan wisata dikarenakan sikap ramah-tamah dan kondisi aman yang dirasakannya pada daerah tujuan wisata tersebut, hingga kondisi tersebut dapat menciptakan kenangan pada wisatawan yang menyebabkan para wisatawan tersebut memiliki keinginan untuk kembali.

Kabupaten Batu Bara didukung pula adanya potensi seni budaya, dan cagar budaya yang dapat meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Batu Bara. Guna menunjang peningkatan arus kunjungan wisatawan perlu upaya-upaya pengembangan dan penataan obyek-obyek wisata, pelestarian cagar budaya, seni dan budaya secara intensif.

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pelaksanaannya melibatkan tiga stakeholder kunci

yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional.

Pengembangan atau pembangunan pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Secara ekonomi pariwisata memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan income per kapita dan peningkatan devisa negara. Dalam bidang kehidupan sosial terjadi interaksi sosial budaya antara pendatang dan penduduk setempat sehingga dapat menyebabkan perubahan dalam way of life masyarakat serta terjadinya integrasi sosial.

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung yang sangat berarti terhadap pembangunan, karena melalui pariwisata dapat diperoleh dana dan jasa bagi pembangunan, diantaranya dapat dilihat dalam bentuk devisa, pajak dan retribusi yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata. Dalam perencanaan pengembangan suatu daerah, sektor pariwisata memberikan peranan besar terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan (leading sector) disamping industri kecil dan agro industri, merupakan suatu instrumen untuk menghasilkan devisa dan sekaligus diharapkan akan memperluas dan meratakan kesempatan berusaha, lapangan kerja serta memupuk rasa cinta tanah air.

Tujuan peningkatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Batu Bara yaitu dengan mendayagunakan potensi pariwisata yang dimiliki menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan pendapatan asli

daerah, kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, agar permasalahannya tidak melebar, maka permasalahannya perlu dirumuskan. Perumusan masalah dimaksudkan sebagai usahaguna menfokuskan penelitian yang akan dilakukan hingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah maka penulis mengemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 dalam program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendukung Implementasi kebijakan pembangunan Pariwisata di Kabupaten Batu Bara.

1.3. Tujuan Penelitian

Sejauhmanapenelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau menjaditujuan penelitian. Dengan kata lain tujuan penelitian adalah untuk memperjelas dan menghindari terjadinya kesimpangsiuran. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengembangan dan program-program pembangunan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk menganalisis dan mengimplementasikan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pembangunan dan perkembangan pariwisata di Kabupaten Batu Bara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kepariwisataan. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Batu Bara sebagai pengambil kebijakan dalam pembangunan kepariwisataan dan masyarakat setempat sebagai pemilik daerah objek wisata. Dengan demikian objek wisata di daerah tersebut dapat menjadi daerah tujuan wisata yang cukup diminati dan dapat menarik kedatangan wisatawan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah.

Kebijakan publik itu sebagai keputusan yang diambil untuk bertindak dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik sesuai norma-norma yang ada pada publik. Norma-norma tersebut menyangkut hal interaksi penguasa, penyelenggara negara dengan rakyat serta bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan. Ukuran normatifnya adalah keadilan sosial, partisipasi dan aspirasi warga negara, masalah-masalah lingkungan, pelayanan, pertanggungjawaban administrasi dan analisis.

Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008). Abidin (2006)

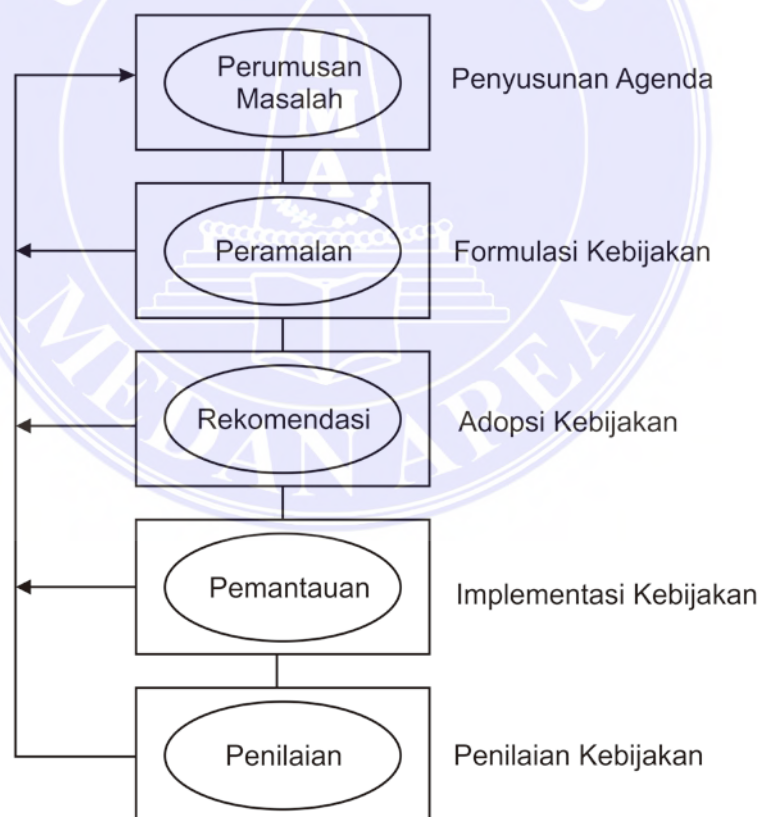
menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Sumaryadi (2005) menjelaskan bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan suatu keputusan yang sudah mantap yang menyangkut kepentingan umum, oleh pejabat-pejabat pemerintah dan instansi-instansi pemerintah dalam proses penyelenggaraan Negara. Selanjutnya Sumaryadi mengatakan bahwa keputusan didasarkan pada pilihan-pilihan atau pertimbangan dalam rangka mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana-sarana yang sesuai.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Wahab (2004) memberikan definisi kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman ini bisa amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya yang seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu program, mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Anderson dalam Winarno (2012) memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan (Tilaar dan Nugroho, 2008). Fattah (2012) menjelaskan bahwa kebijakan publik merujuk pada semua wilayah

tindakan pemerintah yang membentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang biasanya merujuk pada rubrik kebijakan sosial termasuk pendidikan, kesehatan dan wilayah kesejahteraan lainnya.

Dunn (2000) menjelaskan analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya memperbaiki proses pembuatan kebijakan. Sebelum informasi yang relevan dengan kebijakan digunakan oleh pengguna yang dituju, informasi itu harus dirakit kedalam dokumen yang relevan dengan kebijakan dan dikomunikasikan dalam berbagai bentuk presentasi. Aktivitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkan oleh William Dunn berikut :



Gambar 2.1 Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan. Sumber : Dunn (2003:25)

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan financial untuk melakukannya. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang dimasyarakat. Kebijakan publik juga bukanlah sebuah keputusan tunggal melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan demi kepentingan orang banyak menurut Young dan Quin dalam Suharto (2010).

Fattah (2012) mengatakan kebijakan terkait dengan kebijakan publik (public policies) dan dibuat atas nama Negara (state) yang dibuat oleh instrument/alat-alat Negara untuk mengatur perilaku tiap orang, seperti guru atau siswa dan organisasi, seperti sekolah dan universitas. Sehingga kebijakan dalam pendidikan memiliki fungsi yaitu :

1. Menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam Pendidikan.
2. Melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru.

Carl Friedrich dalam Winarno (2012) mengatakan kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tahap-tahap dalam perumusan kebijakan publik tersebut ada tiga hal yang pokok berkenaan dengan kebijakan publik yaitu:

- a. Formulasi kebijakan
- b. Implementasi kebijakan
- c. Evaluasi kebijakan

Namun yang menjadi perhatian dalam pembahasan penelitian ini yang sesuai dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 Kabupaten Batu Bara" adalah bagaimana implementasi suatu kebijakan terhadap objek yang terkena kebijakan tersebut yang dianalisis sampai dengan implementasi kebijakan.

2.2. Implementasi Kebijakan

Kata implementasi (implementation) dari kata dasar verb implement, menurut kamus Oxford-Advanced Learner's Dictionary (1995:595) bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to out put something into effect (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); to carry something out (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, perda ataupun undang-undang lainnya).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapaitujuannya. Tujuan kebijakan pada prinsipnya adalah untuk melakukan intervensi. Oleh karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah tindakan(action) intervensi itu sendiri (Nugroho, 2009).

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Selanjutnya, van Meter dan van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan (Winarno, 2012). Menurut Anderson (1979), ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Siapa yang mengimplementasikan;
2. Hakekatdari proses administrasi;
3. Kepatuhan;dan
4. Dampak dari pelaksanaan kebijakan.

Menurut Edwardsdalam Winarno (2012) implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. George Edwards mempertegas bahwa salah satu dampak dari implementasi

kebijakan publik bisa menjadi rangkaian kesalahpahaman dan penyimpangan terhadap tujuan para pengambil kebijakan, karena orang-orang yang menentukan kebijakan-kebijakan publik tidak sama dengan orang-orang yang mengimplementasikan kebijakan publik tersebut. Jika kebijakan yang baik diimplementasikan dengan buruk maka kebijakan tersebut akan gagal untuk mencapai tujuan para pembuatnya. Permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan publik adalah disebabkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasinya.

2.3. Model Implementasi Kebijakan

Model pendekatan mempengaruhi efektifitas keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Van Meter dan Van Horn menawarkan satu model dasar yang mempunyai enam variabel yang membentuk hubungan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance). Model ini seperti yang diungkapkan oleh van Meter dan van Horn tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel bebas (Winarno, 2014). Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan van Meter dan van Horn disebut dengan A Model of the Policy Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi

kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis

implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Disamping itu, ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus (Winarno, 2014).

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (frustrated) ketika para pelaksana (officials) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (implementors). Arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang “crucial”. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

2. Sumber-sumber Kebijakan

Disamping ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif (Winarno, 2014). Keberhasilan

implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program". Van Mater dan Van Horn (dalam Widodo 1974) menegaskan bahwa: "sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh

ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan sehingga dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Kemudian dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini dikenal dengan beberapa model, antara lain :

A. Model Goggin

Untuk mengimplementasikan kebijakan dengan Model Goggin ini dapat mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi, yakni :

- (1) Bentuk dan isi kebijakan, termasuk didalamnya kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi;
- (2) Kemampuan organisasi dengan segala sumber daya berupa dana maupun insentif lainnya yang akan mendukung implementasi secara efektif;
- (3) Pengaruh lingkungan dari masyarakat dapat berupa karakteristik, motivasi, kecenderungan hubungan antara warga masyarakat, termasuk pola komunikasinya (Goggin et.al, 1990)

B. Model Grindle

Sebagaimana dikutip oleh Wahab (2001) Grindle menciptakan model implementasi sebagai kaitan antara tujuan kebijakan dan hasil-hasilnya,

selanjutnya pada model ini hasil kebijakan yang dicapai akan dipengaruhi oleh isi kebijakan yang terdiri dari :

- (1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi;
- (2) Tipe-tipe manfaat;
- (3) Derajat perubahan yang diharapkan;
- (4) Letak pengambilan keputusan;
- (5) Pelaksanaan program
- (6) Sumber daya yang dilibatkan.

Isi sebuah kebijakan akan menunjukkan posisi pengambilan keputusan oleh sejumlah besar pengambilan kebijakan, sebaliknya ada kebijakan tertentu yang lainnya hanya ditentukan oleh sejumlah kecil unit pengambil kebijakan. Pengaruh selanjutnya adalah lingkungan yang terdiri dari :

- (1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi actor yang terlibat;
- (2) Karakteristik lembaga penguasa;
- (3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Karenanya setiap kebijakan perlu mempertimbangkan konteks atau lingkungan dimana tindakan administrasi dilakukan.

C. Model Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

- (1) Standar kebijakan dan sasaran yang menjalankan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh;
- (2) Sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi;

- (3) Komunikasi inter organisasi dan kegiatan pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai;
- (4) Karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program;
- (5) Kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan;
- (6) Sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan.

D. Model Deskriptif

Dunn (1994) mengemukakan bahwa model kebijakan dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling penting diantaranya adalah :

- (1) Perbedaan menurut tujuan;
- (2) Bentuk penyajian
- (3) Fungsi metodologis model.

Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah : (1) Model Deskriptif, dan (2) Model Normative. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan-pilihan kebijakan, model kebijakan digunakan untuk memonitor hasil tindakan kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di lapangan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejelasan antara kebijakan dan kinerja implementasi yaitu :

- ❖ Standard dan sasaran kebijakan

- ❖ Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktifitas
- ❖ Karakteristik organisasi komunikasi antar komunikasi
- ❖ Kondisi sosial, ekonomi dan politik
- ❖ Sumber daya
- ❖ Sikap pelaksanaan

Selain itu Rippley dan Franklin (1982) menyatakan keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu :

- a. **Perspektif** kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan stake level burcancrats terhadap atas mereka
- b. **Keberhasilan** implementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya personal
- c. **Implementasi** yang berhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua pihak terutama kelompok penerimaan manfaat yang diharapkan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja kebijakan selanjutnya dapat disebutkan sebagai berikut :

- ❖ Organisasi atau kelembagaan
- ❖ Kemampuan politik dari penguasa
- ❖ Pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang
- ❖ Kebijakan pemerintah yang bersifat tak remental
- ❖ Proses perumusan kebijakan pemerintah yang baik
- ❖ Aparatur evaluasi yang bersih dan berwibawa serta profesional
- ❖ Biaya untuk melakukan evaluasi

- ❖ Tersediannya data dan informasi sosial ekonomi yang siap dimanfaatkan oleh penilai-penilai kebijakan.

Peters (1982) mengatakan, implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor :

a) Informasi

Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

b) Isi Keberhasilan

Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidak tepatan atau ketidak tegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

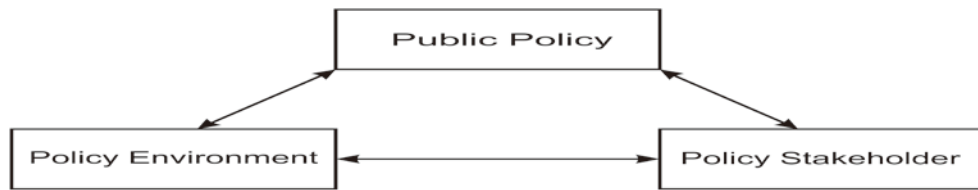
c) Dukungan

Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup untuk kebijakan tersebut.

d) Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensiasi tugas dan wewenang.

Proses implementasi kebijakan hendaknya melalui alur serti dikemukakan oleh Dye (1981) sebagai berikut :



Gambar : 2.2 Kerangka Analisis Kebijakan Publik

Sumber : Thomas R.Dye, *Understanding Public Policy*, 3th ed. (Englewood Cliffs, NJ; Prentice Hall, 1981)

Berdasarkan bagan/kerangka pemikiran dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

- ❖ **Public Policy**, merupakan rangkaian pilihan yang harus lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu sejak pertahanan, energi, dan kesehatan sampai pendidikan, kesejahteraan, dan kejahatan. Pada salah bidang isu terdapat banyak isu kebijakan, yaitu serangkaian arah tindakan pemerintah yang aktual ataupun yang potensial yang mengandung konflik diantara segmen-segmen yang ada dalam masyarakat.
- ❖ **Policy Stakeholder**, yaitu para individu dan atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan misalnya kelompok warga negara, perserikatan birokrasi partai politik, agen-agen pemerintah, pimpinan terpilih dan para analis kebijakan sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan.
- ❖ **Policy Environment**, yaitu konteks khusus dimana kejadian-kejadian disekeliling isu kebijakan terjadi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh

pembuatan kebijakan dan kebijakan publik oleh karena itu, sistem kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas objektif yang dimanifestasikan dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan.



Gambar 2.3. Kerangka Proses Kebijakan Publik

1. **Input**, sumber daya-sumber daya yang digunakan sebagai ujung tombak dalam proses administrasi maupun organisasi pelaksana.
2. **Proses**, adalah interaksi antara aktor yakni antara instansi terkait sebagai pelaksana dengan pengusaha dan masyarakat.
3. **Output**, adalah keluaran yang dihasilkan langsung dari proses kebijakan tersebut.
4. **Outcomes**, adalah hasil yang diharapkan dimana akan memberikan tujuan kebijakan positif kepada Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batu Bara dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas mengenai berbagai teori yang berkaitan dengan implementasi suatu kebijakan publik, maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor

kelembagaan, perilaku para stakeholder, pengelolaan program kebijakan (manajemen kebijakan publik), faktor politik, faktor sosial, dan faktor ekonomi.

2.4. Kebijakan Pembangunan Pariwisata

2.4.1. Pengertian, Objek, Azas dan Fungsi Pariwisata

a. Pengertian Pariwisata

Istilah pariwisata secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar atau berkeliling. Sedangkan wisata berarti berpergian. Secara garis besar pariwisata dapat diartikan sebagai suatu perjalanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik secara kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun belajar (Suwanto, 2004).

Istilah Pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu juga kerana kepentingan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan lain dan bukan untuk kegiatan yang menghasilkan upah (Suwanto, 2004).

Menurut Prof. Hunzieker dan Prof.K.Krapt, (dalam Yoeti, 2002), pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara asalkan pendiaman tersebut tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas sementara tersebut.

Pendapat Prof.Slah Wahab (dalam Yoeti, 2002), bahwa pariwisata merupakan aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapatkan pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu negara itu sendiri atau luar negeri, meliputi pendiaman orang-orang untuk sementara waktu dalam mencapai kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialami dimana ia peroleh tanpa bekerja tetap. Pariwisata merupakan kegiatan yang menyangkut beberapa aspek diantaranya, orang yang melakukan kegiatan wisata, objek atau tempat yang dikunjungi untuk berwisata, Pemerintah dan pengusaha sebagai penyedia sarana, serta masyarakat sebagai pelayan bagi wisatawan baik disengaja maupun tidak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pasal 1 poin 1-4 yang berbunyi :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah seseorang yang melakukan wisata.

3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas-fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

Dengan kata lain Pariwisata merupakan kegiatan yang sangat multidimensional juga lintas sektoral karena kegiatannya tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan substansi sektor lain.

Istilah Pariwisata yang juga di kenal dengan Tourism yang memiliki pengertian yang bervariasi, seperti menurut WTO, Pariwisata adalah aktivitas orang-orang yang mengadakan perjalanan untuk dan tinggal diluar kebiasaan lingkungannya dan tidak hanya untuk kepentingan bisnis dan keperluan lain. (WTO, dalam Richardson&Flicker, 2004)

Sedangkan menurut Fennel, pariwisata didefinisikan sebagai sistem yang saling terkait yang mencakup turis dan layanan terkait yang disediakan dan dimanfaatkan (fasilitas, atraksi, transportasi, dan akomodasi) untuk membantu gerakan mereka (Fennel, 1999). Dengan kata lain Pariwisata merupakan kegiatan yang sangat multidimensional juga lintas sektoral karena kegiatannya tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan substansi sektor lain.

b. Objek dan Daya Tarik Wisata

Kegiatan pariwisata tak terlepas dari Objek atau sesuatu baik itu tempat, benda budaya, atraksi seni atau hal apa saja yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah sebagai suatu tujuan berwisata.

Menurut Mathieson dan Wall (1982), pariwisata mencakup tiga elemen utama yaitu :

1. *a dynamic element*, yaitu tarvel ke suatu destinasi wisata;
2. *a static element*, yaitu singgah di daerah tujuan; dan
3. *a consequential element*, atau akibat dari dua hal diatas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan.

Menurut Suwanto (2004), objek dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan dalam 3 kolompok yaitu :

- a. Objek dan daya tarik wisata alam
- b. Objek dan daya tarik wisata budaya
- c. Objek dan daya tarik wisata minat khusus

Pengertian mengenai objek dan daya tarik wisata menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :

“Objek dan daya tarik wisata merupakan suatu produk wisata,yang terdiri dari objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa berwujud keadaan alam serta flora dan fauna.Objek dandaya tarikwisata hasil karya manusia yang berwujud museum,peninggalan sejarah,purbakala,seni budaya,wisata tirta,pertualangan rekreasi,dan hiburan.”(UU RI Tahun 1990).

Batasan mengenai objek wisata atau daya tarik wisata, dikemukakan oleh Suwanto (2004) sebagai berikut “ Daya tarik wisata juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 1 poin 5-6 yang berbunyi :

1. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
2. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administrative yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Daya tarik wisata atau objek wisata harus dirancang, dan dibangun secara profesional sehingga dapat menarik kedatangan wisatawan. Pembangunan objek dan daya tarik wisata tentu saja harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang secara umum sebagai berikut :

- a. Adanya sumber daya yang menimbulkan rasa senang
- b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya
- c. Adanya ciri khusus atau spesifikasi
- d. Adanya sarana dan prasarana penunjang yang dapat melayani kebutuhan wisatawan yang akan datang.

- e. Objek wisata alam yang mempunyai daya tarik yang tinggi karena keindahan alam, pegunungan, pasir, hutan dan sebagainya.

Objek wisata yang mempunyai daya tarik yang tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, dan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu objek hasil karya manusia di masa lampau.

c. Azas, Fungsi dan Tujuan Pariwisata

Menurut Pasal 2 UU Kepariwisataan Tahun 2009, Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas :

- a) Manfaat
- b) Kekeluargaan
- c) Adil dan merata
- d) Keseimbangan
- e) Kemandirian
- f) Kelestarian
- g) Partisipatif
- h) Berkelanjutan
- i) Demokratis
- j) Kesetaraan; dan
- k) Kesatuan

Dan menurut Pasal 3 pada UU yang sama Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan

kesejahteraan rakyat. Sedangkan tujuan kepariwisataan terdapat pada pasal 4 UU

Kepariwisataan Tahun 2009, kepariwisataan bertujuan untuk :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c) Menghapus kemiskinan;
- d) Mengatasi pengangguran;
- e) Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f) Memajukan kebudayaan;
- g) Mengangkat citra bangsa;
- h) Memupuk rasa cinta tanah air;
- i) Memperkukuh jati diri bangsa; dan
- j) Mempererat persahabatan antar bangsa.

2.4.2. Kebijakan Pariwisata

Menurut Fennel (1999) kebijakan Pariwisata merupakan *“the identification of a series of goals and objectives which help an agency-usually a governmental one – in the process of planning the tourism industry”* (identifikasi dari serangkaian tujuan dan sasaran yang membantu lembaga-biasanya satu pemerintahan – dalam proses perencanaan industri pariwisata).

Namun kebijakan kepariwisataan jauh lebih detail menurut Akehurst adalah :

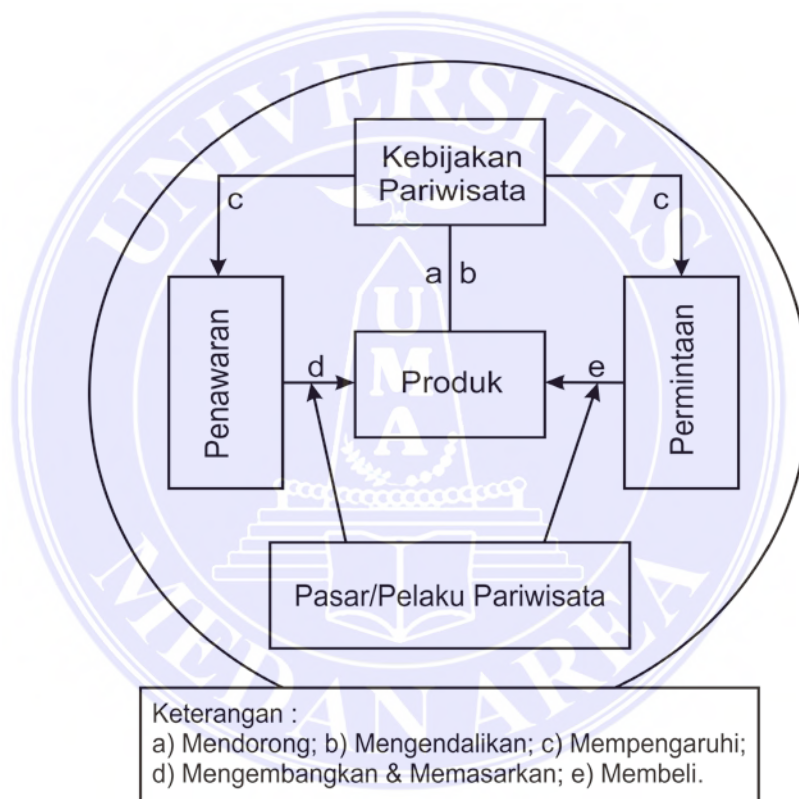
“A strategy for development of the tourism sector, that establishes objectives and guidelines as a basic for what needs to be done. This means identifying and agreeing objectives; establishing priorities; placing in a community context the roles of national government, national tourist

organization, local governments, and private sector businesses; establishing possible co-ordination and implementation of agreed programs to solve identified problems, with monitoring of evaluation of these programs” (Sebuah strategi untuk pengembangan sektor pariwisata, yang menetapkan tujuan dan pedoman sebagai dasar untuk apa yang harus dilakukan. Ini berarti mengidentifikasi dan menyetujui tujuan; menetapkan prioritas; menempatkan dalam konteks masyarakat peran pemerintah nasional, organisasi wisata nasional, pemerintah daerah, dan sektor bisnis swasta; membangun koordinasi yang memungkinkan dan pelaksanaan program yang disepakati untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi, dengan pengawasan dan mengevaluasi program-program tersebut. (Akehurst, 1992 dalam Fennel 1999)

Steck et. Al (1999) dalam Damanik dan Weber (2006) menguraikan mengenai sistem pariwisata. Sebagai suatu aktivitas manusia, pariwisata merupakan fenomena pergerakan manusia, barang dan jasa yang sangat kompleks. Pariwisata terkait erat dengan organisasi, hubungan-hubungan kelembagaan dan individu, kebutuhan layanan, penyediaan kebutuhan layanan dan sebagainya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pariwisata harus membangun hubungan kerjasama. Sehingga pihak-pihak pengelola tersebut dapat saling mempengaruhi dan menjalankan fungsi tertentu sehingga pariwisata dapat berjalan semestinya. Kaitan antara pihak tersebut membentuk sebuah sistem pariwisata. Pariwisata muncul dari empat unsur pokok, yaitu permintaan atau kebutuhan, penawaran atau pemenuhan kebutuhan wisata, pasar dan kelembagaan yang berperan untuk memfasilitasi permintaan dan penawaran, serta pelaku yang menggerakkan ketiga elemen tersebut. Hubungan antara unsur pokok dalam sistem kepariwisataan dapat digambarkan ke dalam Gamabr 2.4

Kelembagaan pariwisata diartikan sebagai kebijakan ataupun kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan pariwisata. Kebijakan mencakup politik pariwisata yang digagas oleh pemerintah, seperti kebijakan pemasaran, jaminan

keamanan, pembebasan visa, dukungan terhadap event budaya, standarisasi produk dan jasa wisata, sertifikasi sumber daya manusia (SDM) dan sebagainya. Pemerintah dapat menarik keuntungan berupa pajak dan retribusi (Damanik & Weber 2006). Pendit (1999) menjelaskan secara khusus bahwa kebijakan pariwisata adalah segala sesuatu tindakan pemerintah dan badan atau organisasi masyarakat yang mempengaruhi kehidupan kepariwisataan.



Gambar 2.4 : Sistem Kepariwisata (Steck et.al 1999 dalam Damanik dan Weber, 2006)

2.4.3. Pembangunan Pariwisata

Pembangunan Kepariwisata dilakukan berdasarkan asas kepariwisataan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana, keunikan, dan kekhasan budaya

dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. (UU No. 10 Pasal 6 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan).

Pembangunan juga berkaitan erat dengan pengembangan, bila pembangunan bisa diartikan dengan melakukan perubahan dari suatu kondisi atau keadaan tertentu menuju ke arah yang lebih baik, maka pengembangan bisa berarti memajukan dan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang telah ada.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kepariwisataan, menyatakan tujuan suatu pengembangan pariwisata sebagai berikut :

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek daya tarik wisata;
- b. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa.
- c. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan memperluas lapangan kerja;
- d. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- e. Mendorong pendayagunaan produk nasional.

Yoeti (1997) mengatakan bahwa, pengembangan suatu produk pariwisata, baik berupa objek wisata maupun daya tarik wisata adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki produk atau objek wisata yang sedang berjalan atau menambah jenis produk atau objek wisata yang dihasilkan ataupun yang pasarkan.

Menurut pasal 7 UU Kepariwisataan Tahun 2009, pembangunan kepariwisataan meliputi :

1. Industri pariwisata
2. Destinasi pariwisata
3. Pemasaran
4. Kelembagaan pariwisata.

Pembangunan pariwisata tidak hanya menitik beratkan pada pembangunan fisik saja, namun dibutuhkan juga peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia guna menunjang pembangunan citra pariwisata. Karena keramahan penduduk dan orang-orang yang bersinggungan langsung dengan pariwisata memiliki nilai daya tarik sendiri untuk menimbulkan minat wisatawan untuk kembali berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata.

Menurut Liu, kerangka implementasi kebijakan pembangunan pariwisata paling tidak harus menyentuh empat aspek yaitu :

1. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur
2. Aktivitas pemasaran
3. Peningkatan kualitas budaya dan lingkungan
4. Pengembangan sumber daya manusia (Liu,1994)

Suwartono (2004), juga sependapat dengan Liu, yang memasukkan faktor SDM atau masyarakat sebagai salah satu untuk pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata. Lima unsur pokok yang menunjang pengembangan dan pembangunan pariwisata di daerah tujuan wisata :

1. Objek dan daya tarik wisata
2. Prasaranan wisata
3. Sarana wisata

4. Tata Laksana/Insfrastruktur
5. Masyarakat/lingkungan

Menurut Yoeti (1997) pemngembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Pembangunan perekonomian daerah tersebut, dalam arti pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak.
- b. Pengembangan pariwisata juga bersifat non ekonomis. Dengan majunya pembangunan dan pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata, maka hasrat dan keinginan masyarakat setempat untuk memelihara semua aset wisata yang ada di daerah itu akan semakin meningkat. Dengan demikian, suasana yang nyaman, bersih, dan aman, serta lingkungan yang terpelihara akan memberikan kesenangan dan kepuasan bagi wisatawan yang datang mengunjungi daerah itu.
- c. Pengembangan pada suatu daerah wisata juga bertujuan untuk menghilangkan kepikiran berfikir, mengurangi salah pengertian, mengenal sikap dan budaya orang lain (wisatawan). Dengan kata lain, adanya interaksi antara masyarakat setempat dengan para wisatawan akan membuka mata masyarakat sekitarnya dalam banyak hal.

Untuk mencapai dan menjamin pembangunan dan pengembangan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan, diperlukan perencanaan dan strategi yang tepat dan baik, juga penelitian terhadap semua aspek yang berkaitan dengan kepariwisataan itu, mulai dari potensi, kebiasaan masyarakat setempat,

kepercayaan yang dianut, dan juga tingkah laku atau kebiasaan wisatawan yang direncanakan akan di tarik untuk berkunjung pada daerah tujuan wisata tersebut. Dengan perencanaan dan strategi pembangunan dan pengembangan yang baik, maka dapat dihasilkan kebijakan yang baik dan bermanfaat dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi semua pihak, sementara dampak-dampak negatif dari pembangunan dan pemngembangan pariwisata tersebut dapat dihindari atau paling tidak dapat diminimalisir.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Batu Bara dan Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batu Bara sebagai Implementator dan pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 dalam program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Penelitian lapangan dilaksanakan pada April sampai Mei 2017.

3.2. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu: Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan metode kualitatif. Menurut Lexy. J Moelong (2011) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan suatu penelitian yang menganalisa tentang status suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran.

3.3. Teknik Pengumpulan

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan, yang diperoleh melalui :

a. Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan key informan (informan kunci) secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti. Adapun sebagai key informan sebanyak 22 orang yang terdiri dari :

- Sekretaris Daerah Kab. Batu Bara : 1 orang
- DPRD Kabupaten Batu Bara : 4 orang
- Asisten Pembangunan Kab. Batu Bara : 1 orang
- Badan Pembangunan Daerah : 1 orang
- Dinas Pekerjaan Umum : 1 orang
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Batu Bara : 5 orang
- Masyarakat Pariwisata : 9 orang

b. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi yang terkait dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk

Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batu Bara.

3.4. Variabel Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami variabel yang akan diukur dalam penelitian ini, perlu dirumuskan pengertian dan istilah yang digunakan untuk memperoleh batasan yang jelas dan memudahkan dalam menentukan indikatornya. Variabel dalam penelitian ini menggunakan satu variabel atau variabel tunggal, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 dalam program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Adapun kajian yang akan dideskripsikan meliputi :

1. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 dalam program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 dalam program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah penyampaian informasi baik langsung maupun tidak langsung mencakup unsur komunikator, pesan, sasaran, media atau saluran dan efek, yang meliputi aspek-aspek :

- 1) Aspek transmisi
 - a) Kesesuaian antara pemahaman pelaksanaan dengan perintah kebijakan.
 - b) Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang jelas dan tepat sebagai tindak lanjut dari keputusan-keputusan dan perintah-perintah untuk melaksanakan pembangunan kepariwisataan.
 - c) Pengetahuan pelaksana atas pelaksanaan kebijakan yang benar.
- 2) Aspek konsisten
 - a) Kesesuaian antara perintah-perintah dalam implementasi kebijakan dengan petunjuk-petunjuk pelaksanaan.
 - b) Konsensus dalam pencapaian tujuan kebijakan.
- 3) Aspek kejelasan
 - a) Kejelasan dari instruksi-instruksi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 dalam program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata.
 - b) Kejelasan dalam penyampaian informasi tentang kebijakan.

b. Sumber Daya

Sumber daya adalah kemampuan untuk berbuat sesuatu yang dapat mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2029 dalam program pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata meliputi aspek : Staf, informasi, wewenang, fasilitas.

c. Disposisi

Sikap dan kepatuhan dari implementator dalam melaksanakan kebijakan yang diterima dan dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

d. Struktur Birokrasi

Adanya keterpaduan komponen pelaksana dalam pelaksanaan program dan pengaruh dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi keterpaduan komponen pelaksanaan dalam mencapai tujuan.

3.5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi dan data. Jadi teknik analisa data

deskriptif kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara, observasi dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan dilapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang jenis tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Batu Bara

4.1.1. Letak dan Geografis

Kabupaten Batu Bara yang dimekarkan menjadi wilayah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Asahan dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu Asahan dan Batu Bara. Wilayah Asahan terdiri dari atas 13 Kecamatan sedangkan Batu Bara 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Sei Balai, Kecamatan Talawi, Kecamatan Tanjung Tiram, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Air Putih, Kecamatan Sei Suka dan Kecamatan Medang Deras.

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 3 Tahun 2007 ditetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Batu Bara adalah tanggal 8 Desember 2006 sesuai dengan Persetujuan Bersama DPR RI yang memutuskan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara. Kabupaten Batu Bara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang baru terbentuk pada tahun 2007 berdasarkan pemekaran dari Kabupaten Asahan. Kabupaten Batu Bara berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka. Kabupaten Batu Bara menempati area seluas 904,96 km² atau 90.496 Ha yang terdiri 7 kecamatan serta 151 desa/kelurahan defenitif. Letak geografis Kabupaten Batu Bara berada di 2°03'00" – 3°26'00" Lintang Utara dan 99°01-100'00" Bujur Timur. Adapun batas administrasi Kabupaten Batu Bara yaitu :

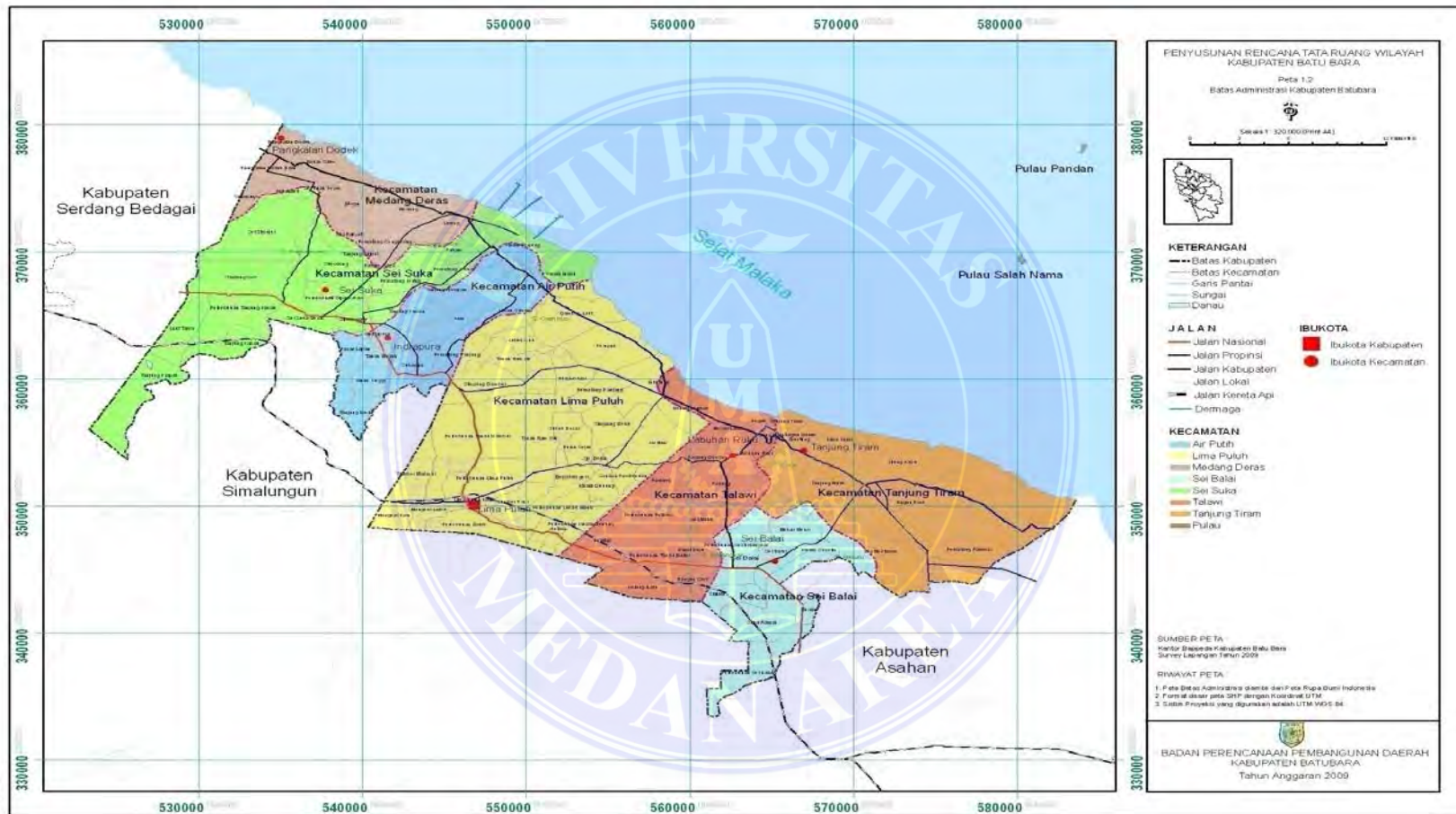
1. Sebelah Utara : Kabupaten Serdang Bedagai
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Asahan
3. Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun
4. Sebelah Timur : Selat Malaka

Ibukota Kabupaten Batu Bara terletak di Kecamatan Lima Puluh. Berdasarkan daerah menurut kecamatan, daerah Lima Puluh merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 239,55 km² atau 26,47% dari luas total Kabupaten Batu Bara. Sedangkan Kecamatan Medang Deras merupakan wilayah terkecil dengan luas 65,47 km² atau 7,23% dari luas total Kabupaten Batu Bara.

Tabel 4.1. Luas Wilayah Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah	
			Desa	Kelurahan
1.	Sei Balai	92.64	14	-
2.	Tanjung Tiram	173.79	20	2
3.	Talawi	89.80	19	1
4.	Lima Puluh	239.55	34	1
5.	Air Putih	72.24	17	2
6.	Sei Suka	171.47	19	1
7.	Medang Deras	65.47	18	3
Jumlah		904.96	141	10

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Batu Bara, 2015.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kabupaten Batu Bara

4.1.2. Demografis

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Batu Bara terus menunjukkan peningkatan, pada tahun 2011 berjumlah 379.400 jiwa dan pada tahun 2015 menjadi 400.803 jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2015 terbesar berada di Kecamatan Lima Puluh, yaitu sebanyak 89.864 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Sei Balai, yaitu sebanyak 27.827 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Batu Bara di tahun 2010-2015 sebesar 1,14 % per tahun di setiap kecamatan. Pertumbuhan penduduk tersebut diambil berdasarkan pertumbuhan kabupaten bukan rata-rata laju pertumbuhan kecamatan, dikarenakan ada perkembangan laju jumlah penduduk kecamatan yang mengalami penurunan atau minus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 – 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sei Balai	26.857	26.914	27.073	27.211	27.609	27.827
Tanjung Tiram	62.964	63.728	63.996	64.321	66.749	67.492
Talawi	53.585	54.185	54.445	54.722	57.128	57.860
Lima Puluh	85.164	85.811	86.079	86.517	89.033	89.864
Air Putih	46.749	47.017	47.171	47.411	49.217	49.776
Sei Suka	52.599	53.010	53.206	53.476	55.045	55.570
Medang Deras	47.967	48.735	49.053	49.302	51.698	52.414
Batu Bara	375.885	379.400	381.023	382.960	396.479	400.803

Sumber: BPS Kabupaten Batu Bara, 2015.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, 2010, 2014, dan 2015

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
Sei Balai	26 909	27 609	27 827	0,68	0,79
Tanjung Tiram	63 212	66 749	67 492	1,35	1,11
Talawi	53 782	57 128	57 860	1,52	1,28
Lima Puluh	85 437	89 033	89 864	1,04	0,93
Air Putih	46 886	49 217	49 776	1,23	1,14
Sei Suka	52 768	55 045	55 570	1,06	0,95
Medang Deras	48 180	51 698	52 414	1,77	1,39
Batu Bara	377 174	396 479	400 803	1,14	1,09

Sumber : Proyeksi Penduduk Kabupaten Batu Bara 2010

Berdasarkan data diperoleh kepadatan penduduk di Kabupaten Batu Bara pada tahun 2015 sebesar 443,00 jiwa/km². Kepadatan terbesar di Kecamatan Medang Deras sebesar 801,00 jiwa/km² dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Sei Suka sebesar 324,00 jiwa/km².

Tabel 4.4. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara, 2015

Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
Sei Balai	6,94	300
Tanjung Tiram	16,84	388
Talawi	14,44	644
Lima Puluh	22,42	375
Air Putih	12,42	689
Sei Suka	13,86	324
Medang Deras	13,08	801
Batu Bara	100,00	443

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

Rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan pada tahun 2015 sebesar 1:1, artinya dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Bila dilihat *sex ratio* di tiap kecamatan, maka Kabupaten Batu Bara yang memiliki ratio perempuan terkecil yaitu 199.106 jiwa penduduk dan yang memiliki ratio laki-laki terbesar yaitu 201.697 jiwa penduduk.

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Batu Bara 2015.

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
Sei Balai	13 912	13 915	27 827	100
Tanjung Tiram	34 617	32 875	67 492	105
Talawi	29 282	28 578	57 860	102
Lima Puluh	44 700	45 164	89 864	99
Air Putih	24 705	25 071	49 776	99
Sei Suka	27 987	27 583	55 570	101
Medang Deras	26 494	25 920	52 414	102
Batu Bara	201 697	199 106	400 803	101

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara

4.1.3. Potensi Pariwisata Kabupaten Batu Bara

Daya tarik wisata lain yang menonjol dan sangat layak untuk dikembangkan di Kabupaten Batu Bara adalah wisata pantai sepanjang pesisir timur kabupaten yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Beberapa

destinasi wisata pantai yang ada di Kabupaten Batu Bara diantaranya Pantai Bunga; Pantai Alam Datuk; Pantai Perjuangan/Pantai Jono; Pantai Bunga Laut Indah; Waduk Indah dan Danau Laut Tador. Sementara untuk daya tarik buatan di Kabupaten Batu Bara dapat dikategorikan ke dalam kelompok wisata sejarah, diantaranya Istana Niat Lima Laras; Komplek Makam Raja Lima Laras; Kubah Datu Bara; Meriam Bogak; Meriam Namasiam; Komplek Masjid Padang Gennting; Meriam Simpang Dolok; Sumur Bor Simpang Dolok; Situs Pemakaman Masjid Lamo; Kompleks Makam Wan Alang; Benteng Jepang; Meriam Datuk Simuangsa; Istana Indrapura; Masjid Indrapura; dan Kompleks Makam Raja Indrapura.

Tabel 4.6. Jenis, Bentuk dan Lokasi Wisata Objek Wisata di Kabupaten Batu Bara

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Alamat/Lokasi
1.	Istana Lima Laras	Budaya/ Sejarah	Desa Lima Laras Kec.Tanjung Tiram
2.	Kubah Datuk Keramat	Religi	Desa Kuala Gunung Kec. Lima Puluh
3.	Danau Laut Tador	Rekreasi	Desa Laut Tador Kec. Sei Suka
4.	Pantai Perjuangan	Rekreasi	Desa Lalang Kec. Medang Deras
5.	Pantai Sejarah	Rekreasi	Desa Perupuk Kec Lima Puluh
6.	Pantai Bunga	Rekreasi	Desa Tanjung Tiram
7.	Wisata Alam Datuk	Rekreasi	Desa Kuala Indah Kec. Sei Suka
8.	Pulau Pandan	Rekreasi/Bahari	Sebelah Utara Tanjung Tiram

No	Nama Objek Wisata	Jenis Objek Wisata	Alamat/Lokasi
9.	Pulau Salah Nama	Rekreasi/Bahari	Selat Malaka, Bagian dari Kab. Batu Bara
10.	RM 100	Kuliner	Kec. Sei Suka
11.	Kain Tenun Batu Bara	Kerajinan	Desa Simpang Dolok Indrapura Kec. Air Putih
12.	Istana Kerajaan Indrapura	Budaya/ Sejarah	Desa Modang
13.	Kebun Dolok	Rekreasi	Desa Sei Suka Kec. Air Putih
14.	Tugu Perjuangan	Peninggalan Sejarah	Jl. Lintas Sumatera – Kisaran Kec. Sei Balai
15.	Rumah Makan Bale Resto	Kuliner	Desa Perupuk Kec. Lima Puluh
16.	Benteng Perang Peninggalan Jepang	Budaya/ Sejarah	Simpang Dolok Kec. Lima Puluh
17.	Meriam Simpang Dolok	Budaya/ Sejarah	Jl. Lintas Sumatera
19.	Rumah Makan Ladang Sari	Kuliner	

Sumber : RTRW Kabupaten Batu Bara

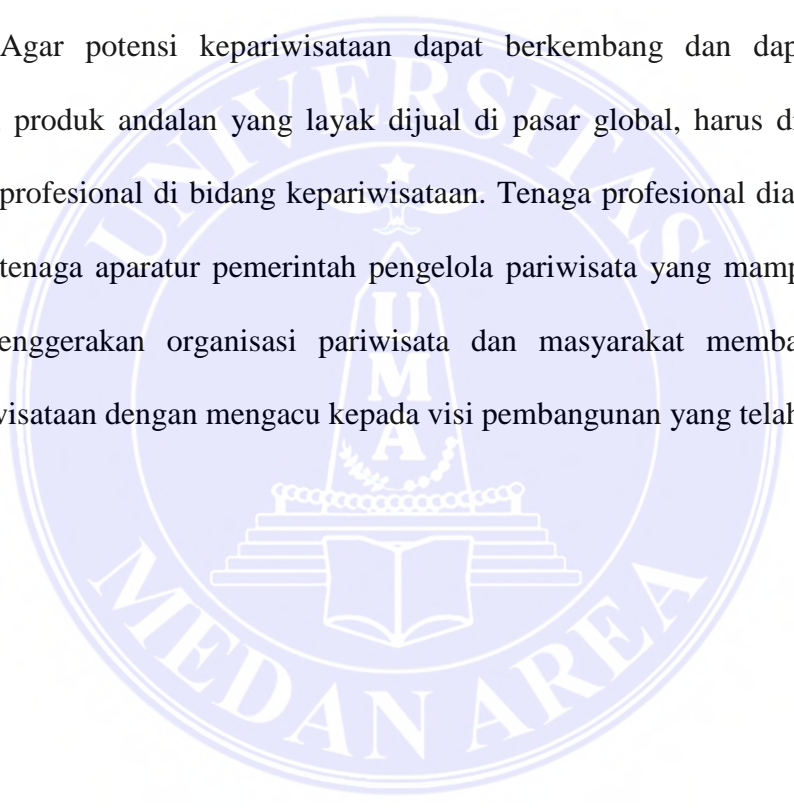
Tabel 4.7. Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2016 di Kabupaten Batu Bara

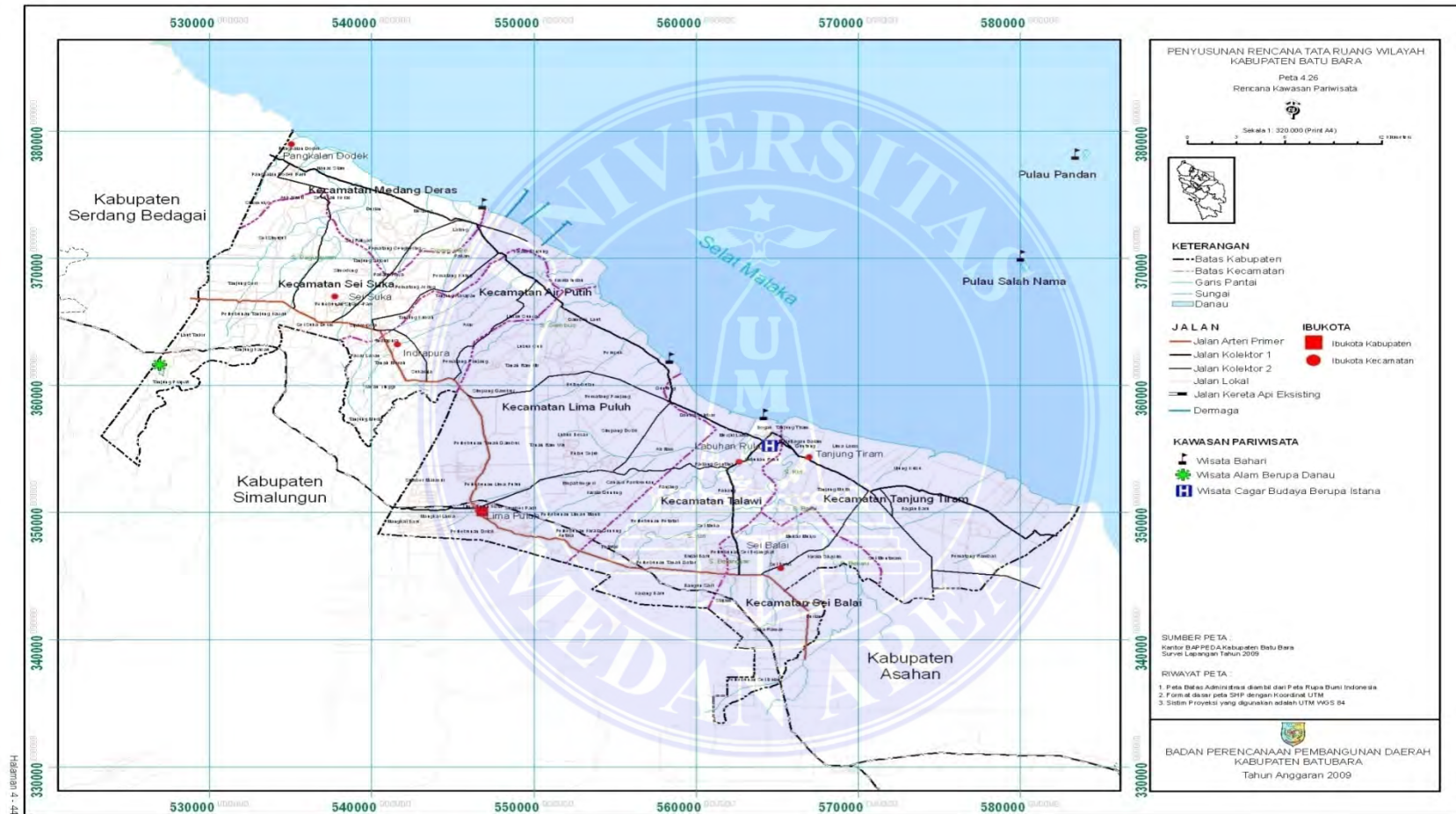
NO.	OBJEK WISATA	JLH. WISATAWAN	KET
1	Pantai Bunga	30.556	
2	Pantai Galuh	663	
3	Pulau Salah Namo	1.556	
4	Pulau Pandang	1.556	
5	Istana Niat Lima Laras	873	
6	Meriam Bogak	243	
7	Pantai Bali	20.823	
8	Pantai Sejarah	702	
9	Kubah Keramat Datok	113	
10	Meriam Simpang Dolok	253	
11	Pantai Alam Datuk	80.456	
12	Daun Laut Tador	500	
13	Pantai Sujono	257.916	
14	Meriam Nenas Siam	563	
	JUMLAH	396.773	

Sumber : Disparpora Kabupaten Batu Bara 2016

Menyadari akan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memasuki era otonomi dan globalisasi berupaya membenahi kepariwisataan Kabupaten Batu Bara dari segala aspek dengan tujuan meraih tempat sebagai daerah tujuan wisata utama, sehingga sektor kepariwisataan menjadi sumber atau pemasok dana strategis dalam menunjang pembangunan daerah.

Agar potensi kepariwisataan dapat berkembang dan dapat dijadikan sebagai produk andalan yang layak dijual di pasar global, harus ditangani oleh tenaga profesional di bidang kepariwisataan. Tenaga profesional diartikan bahwa tenaga-tenaga aparatur pemerintah pengelola pariwisata yang mampu membawa dan menggerakkan organisasi pariwisata dan masyarakat membangun sektor kepariwisataan dengan mengacu kepada visi pembangunan yang telah ditetapkan.





Gambar 4.2. Peta Kawasan Wisata Kab. Batu Bara

4.1.4. Profil Objek Wisata Unggulan di Kabupaten Batu Bara

1. Pulau Salah Namu

Pulau Salah Namu terletak di Kecamatan Tanjung Tiram, dan dapat dicapai dengan menggunakan angkutan laut berupa perahu motor dengan jarak tempuh lebih kurang 1(satu) jam perjalanan dari dermaga di Tanjung Tiram. Pulau Salah Namu disebut demikian karena pulau ini diberi nama dengan sejenis burung, yang bagi penduduk lokal sebutan burung itu menyangkut hal yang tabu untuk disebutkan. Untuk tidak menimbulkan persepsi yang tidak diinginkan akhirnya masyarakat menyebutnya dengan sebutan Pulau Salah Namu. Pulau Salah Namu masih diapit oleh beberapa pulau-pulau karang kecil yang pada saat air surut gugusan karang terlihat dengan jelas. Dibagian depan yang menghadap ke daratan induk terdapat sedikit kawasan pepantaian dengan pasir putih dengan bebatuan.

2. Pulau Pandang

Pulau Pandang bukan merupakan pulau terluar Indonesia. Untuk sampai ke Pulau Pandang dibutuhkan waktu kurang lebih 2 jam dengan menggunakan perahu motor. Pulau Pandang juga merupakan tempat persinggahan berbagai jenis Penyu untuk bertelur. Banyaknya penyu yang bertelur di pulau ini memungkinkan pulau ini dijadikan sebagai wilayah konversi alam dengan tugas pokok penangkaran penyu (utamanya penyu Belimbing).

3. Pantai Perjuangan/Pantai Jono

Pantai Perjuangan/Pantai Jono merupakan destinasi wisata pantai yang sudah sangat dikenal oleh wisatawan lokal sebagai sarana rekreasi yang sering dikunjungi. Destinasi wisata yang terletak di Desa Lalang Kecamatan Medang Deras ini dapat dijangkau dengan mudah karena letaknya yang tidak terlalu jauh dari jalan utama. Ciri utama dari pantai ini adalah hamparan pasir putihnya yang demikian luas.

4. Pantai Bunga

Disamping Pantai Perjuangan/Pantai Jono, di Kabupaten Batu Bara masih terdapat sejumlah pantai lain dengan model pengelolaan dan fasilitas yang lebih kurang sama dengan Pantai Perjuangan/Pantai Jono, diantaranya Pantai Bunga di Kecamatan Tanjung Tiram. Ciri utama dari pantai ini adalah tanaman mangrove.

5. Pantai Wisata Alam Datuk

Pantai Alam Datuk Kota Sungai Pasir terletak di Desa Kuala Indah Kecamatan Sei Suka. Dilokasi wisata alam datuk terdapat beberapa wahana permainan anak, dan sarana perpakiran yang cukup luas. Pantai alam datuk berlatar belakang Port dan Smelter PT. Inalum.

6. Danau Laut Tador

Pesona Danau Laut Tador yang berlokasi di Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara tepatnya ditengah-tengah perkebunan sawit PT. Paya Pinang Group. Sekitar Danau Laut Tador terdapat tumbuhan yang usianya ratusan tahun dan diyakini disekitar danau itu terdapat ratusan jenis tumbuh-

tumbuhan, bisa menjadi objek pelajaran bagi anak-anak sekolah untuk mengetahui keadaan alam maupun jenis tumbuhan.

7. Istana Lima Laras

Istana lima laras merupakan bangunan bersejarah peninggalan Raja Lima Laras Datuk Muhammad Yuda yang merupakan keturunan Raja yang ke-11. Beliau berkuasa sekitar tahun 1883 sampai dengan 1919. Raja terakhir yang berkuasa adalah Datuk Muda Abdul Roni yang mengakhiri kekuasaannya sekitar tahun 1923. Setelah masa itu semua kekuasaan atas Istana lima laras jatuh ke tangan Belanda. Pada zaman revolusi fisik Istana Lima Laras dijadikan sebagai markas dari Tentara Nasional Indonesia.

4.2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

4.2.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor ; 3 Tahun 2001 pasal 35 Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kab. Batu Bara mempunyai tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Tugas :

Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kab. Batu Bara mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas pembangunan, serta tugas dekonsentrasi di bidang Pariwisata dan Pemuda Olahraga

2. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kab. Batu Bara menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan konsep kebijakan, ketentuan dan standard pelaksanaan tugas-tugas dinas bidang Pariwisata dan Pemuda Olahraga dan pemberdayaan prasarana dan sarana;
- b. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan tahunan bidang Pariwisata dan Pemuda Olahraga, sesuai kebijakan daerah, ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama kemitraan dengan pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan bidang Pariwisata dan Pemuda Olahraga sesuai kebijakan daerah, ketentuan dan standard yang ditetapkan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai bidang dan fungsi;
- e. Pemberian masukan yang perlu kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai bidang dan fungsi;
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai standard yang ditetapkan.

Sebagai implementasi dari Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Kab. Batu Bara, maka tujuan organisasi diarahkan untuk :

1. Mewujudkan iklim bidang Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahragayang berwawasan kebangsaan, unggul, sehat, disiplin, terampil dan bertanggung jawab;
2. Mewujudkan kehidupan sosial pemuda dan masyarakat olahraga yang berkepribadian,dinamis, kreatif, serta mampu menyesuaikan diri secara positif dalam era globalisasi.
3. Meningkatkan kesadaran pemuda dan masyarakat olahraga dalam menciptakan iklim yang kondusif.
4. Meningkatkan kualitas SDM yang produktif, maju, mandiri, dan berwawasan lingkungan untuk menggalang kekuatan ekonomi kerakyatan.

4.2.2. Rincian Tugas

1. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
 - a. Menyusun perumusan kebijakan daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Sekretaris untuk disampaikan kepada Kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis.
 - c. Memberikan petunjuk dan arahan kepada sekretaris kepada para Kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
 - d. Mengkoordinasikan Sekretaris para Kepala Bidang dan Unit pelaksana Teknis secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin

hubungan kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya masing – masing.

- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada unit kerja dilingkungan sekretariat para Kepala Bidang dan Unit Pelaksana Teknis untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya.
- f. Meneliti, Mendisposisi, Memaraf dan Menandatangani persuratan yang berkaitan dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- g. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah menyangkut Bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- i. Mengkoordinir kegiatan penyelenggaraan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang meliputi urusan umum, keuangan dan urusan kepegawaian serta urusan perencanaan program.
- j. Mengkoordinir kegiatan membina dan mengurus kegiatan Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- k. Mengkoordinir kegiatan melaksanakan perencanaan, pengkajian, penyusunan, pengembangan dan analisa.
- l. Membina dan melaksanakan kerjasama dalam bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan Instansi pemerintah serta pihak – pihak lain sesuai

dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah.

- m. menilai hasil kerja bawahan dilingkungan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai.
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban dan penilaian atasan.
- o. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sesuai dengan Bidang tugas dan permasalahannya.

2. Sekretaris

- a. Menyusun langkah kegiatan sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan berpedoman kepada *Tupoksi* serta *visi* dan arah pembangunan daerah serta kegiatan terdahulu dalam pelaksanaan tugas.
- b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepala Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan permasalahannya.
- c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para kepala Sub Bagian agar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bagian dilingkungan Sekretariat baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin

hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya masing – masing.

- e. Mengatur dan mendistribusikan surat-surat sesuai disposisi Kepala Dinas baik keluar maupun kedalam Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga.
- f. Mengkoordinir pengelolaan surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan perlengkapan, administrasi rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan barang inventaris, pengelolaan perlengkapan kantor, serta keprotokolan dan hubungan masyarakat.
- g. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga.
- h. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga.
- i. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan serta kesejahteraan pegawai.
- j. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan pertunjukan ketatalaksanaan serta pembinaan pegawai.
- k. Mengkoordinir pelaksanaan tugas, menyusun bahan perencanaan dan program kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga, menyusun bahan laboran dan evaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga.

- l. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan sekretariat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai.
 - m. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang pelayanan administrasi pada satuan organisasi dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga.
 - n. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat sebagai pertanggungjawaban dan penilain atasan.
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
3. Kepala Bidang Pariwisata
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pariwisata dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahan.
 - c. Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para kepala seksi dilingkungan Bidang Pariwisata sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.

- d. Mengkoordinasikan para kepala seksi baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas, mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan proses perizinan serta pemantauan Hotel, rumah makan dan restoran/bar serta usaha jasa Pariwisata lainnya :
- f. Peraturan Usaha Pondok Wisata
- g. Peraturan Usaha Rumah Makan
- h. Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan
- i. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Tugas, Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan retribusi Perizinan Usaha Pariwisata
- j. Mengkoordinir pelaksanaan tugas mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pembinaan dan pemantauan tenaga kerja pariwisata;
- k. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi pada Bidang Pariwisata baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang dan permasalahannya.
- l. Menyeleksi pelaksanaan kegiatan Kepala Seksi dilingkungan Bidang Pariwisata sesuai dengan rencana dan realisasi.
- m. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi dilingkungan untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya.

- n. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Bidang Pariwisata supaya sesuai dengan rencana;
- o. Meneliti dan menyeleksi konsep rencana kegiatan seksi dilingkungan Bidang Pariwisata agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- p. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Bidang Pariwisata berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;

❖ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata**

- a. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Bidang Pariwisata untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya.
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pariwisata sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- d. Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- e. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya.

- f. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf dilingkungan Usaha Jasa Pariwisata untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan.
- g. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Usaha Jasa Pariwisata.
- h. Mengumpulkan dan mengolah data yang berkenaan dengan jasa perjalanan dan jasa pemandu wisata.
- i. Menginventarisir biro perjalanan dan pemandu wisata yang ada didaerah.
- j. Mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan biro perjalanan dan pemandu wisata.
- k. Memonitoring dan evaluasi kegiatan operasional usaha perjalanan dan pemandu wisata yang ada.
- l. Menginventarisasi permasalahan – permasalahan yang berhubungan dengan Seksi Usaha Jasa Pariwisata serta menyiapkan bahan pemecahannya.
- m. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan Seksi Usaha Jasa Pariwisata berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai.
- n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Seksi Usaha Jasa Pariwisata untuk Pembinaan dan Peningkatan tugas selanjutnya.
- o. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata sebagai penanggung jawaban dan penilaian atasan;

- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan permasalahannya.

❖ **Tugas Pokok dan Fungsi Staf Seksi Usaha Jasa Pariwisata**

- a. Membantu Kepala Seksi Usaha Jasa Pariwisata dalam penyusunan rencana kegiatan terkait Seksi Usaha Jasa Pariwisata dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan;
- c. Menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan terkait kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
- d. Melaksanakan pengarsipan data terkait dengan jasa perjalanan dan jasa pemandu wisata;
- e. Menginventarisir biro perjalanan dan pemandu wisata yang ada di daerah;
- f. Mengumpulkan, menyusun bahan terkait dengan pembinaan biro perjalanan dan pemandu wisata;
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan Seksi Usaha Jasa Pariwisata;
- h. Mengerjakan tugas pengetikan surat menyurat dan laporan – laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Usaha Jasa Pariwisata;

❖ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Pengelolaan Objek wisata**

- a. Menyusun rencana kegiatan Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang permasalahannya.
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf dilingkungan Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan.
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata.
- e. Mengumpulkan dan mengolah data sehubungan dengan atraksi dan pemasaran wisata serta promosi wisata.
- f. Menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi, rencana kegiatan dan pengembangan objek dan bahan promosi pariwisata serta bahan peningkatan publikasi atraksi kepariwisataan daerah serta menyiapkan bahan pemecahannya.
- g. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut seksi Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya.

- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata dan peningkatan tugas selanjutnya.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

❖ **Tugas Pokok dan Fungsi Staf Pengelolaan Objek wisata**

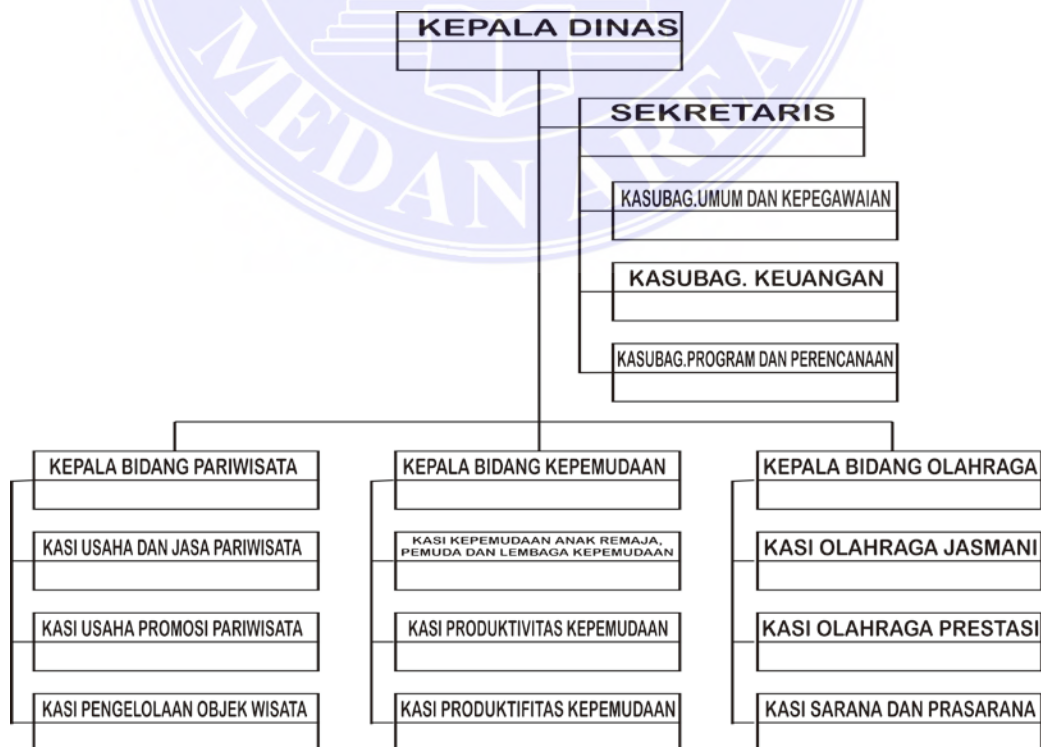
- a. Membantu penyusunan rencana kegiatan seksi Objek, Antariksa, Informasi dan Pemasaran Pariwisata dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan
- c. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan terkait kegiatan Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata.
- d. Melaksanakan pengarsipan data terkait dengan Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata.
- e. Mengumpulkan, menyusun bahan terkait dengan Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata.
- f. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan terkait dengan Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata
- g. Mengerjakan tugas pengetikan surat menyurat dan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Objek, Atraksi, Informasi dan Pemasaran Wisata.

❖ **Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran**

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pariwisata dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuandan peraturan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.
- c. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf dilingkungan Promosi dan Pemasaran untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan.
- d. Minyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Promosi dan Pemasaran.
- e. Mengumpulkan dan mengola data yang berkenaan dengan jasa perjalanan dan jasa pemandu wisata.
- f. Menginventarisasi biro perjalanan dan pemandu wisata yang ada didaerah
- g. Mengumpulkan, menyusun bahan pembinaan biro perjalanan dan pemandu wisata
- h. Memonitoring dan evaluasi kegiatan operasional usaha perjalanan dan pemandu wisata yang ada.

- i. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan seksi usaha jasa pariwisata serta menyiapkan bahan pemecahannya.
- j. Menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksi usaha jasa pariwisata berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai.
- k. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut seksi usaha pariwisata untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya.
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Promosi dan Pemasaran sebagai penanggungjawab dan penilaian atasan.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang dan permasalahannya.

4.2.3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga



Gambar 4.3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

4.3. Visi dan Misi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Visi

Sebagai penanggung jawab dalam merealisasikan tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batu Bara merumuskan Visi sebagai berikut

“Terwujudnya Masyarakat Yang Sehat Jasmani Dan Rohani, Berbudaya Serta Menciptakan Objek Wisata Menjadikan Kabupaten Batu Bara Sejahtera Berjaya“.

Misi

1. Visi adalah cara pandang jauh kedepan dan merupakan gambaran di masa datang yang diinginkan/dicita-citakan oleh Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Batu Bara
2. Pemuda adalah masyarakat Kabupaten Batu Bara yang berumur 15 s.d 35 tahun, kita jadikan ujung tombak pelaku pembangunan Daerah Batu Bara
3. Masyarakat olahraga Kabupaten Batu Bara wajib, sehat jasmani dan rohani serta di perhitungkan pada pesta olahraga daerah/ nasional
4. Berbudaya adalah ciri-ciri masyarakat Kabupaten Batu Bara yang tetap menjunjung tinggi adat istiadat dan keragaman yang Ber-Bhineka Tunggal Ika.
5. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di

bidang tersebut yang salah satu sumber pendapatan daerah yang kita wujudkan pada tahap pembangunan

Tujuan

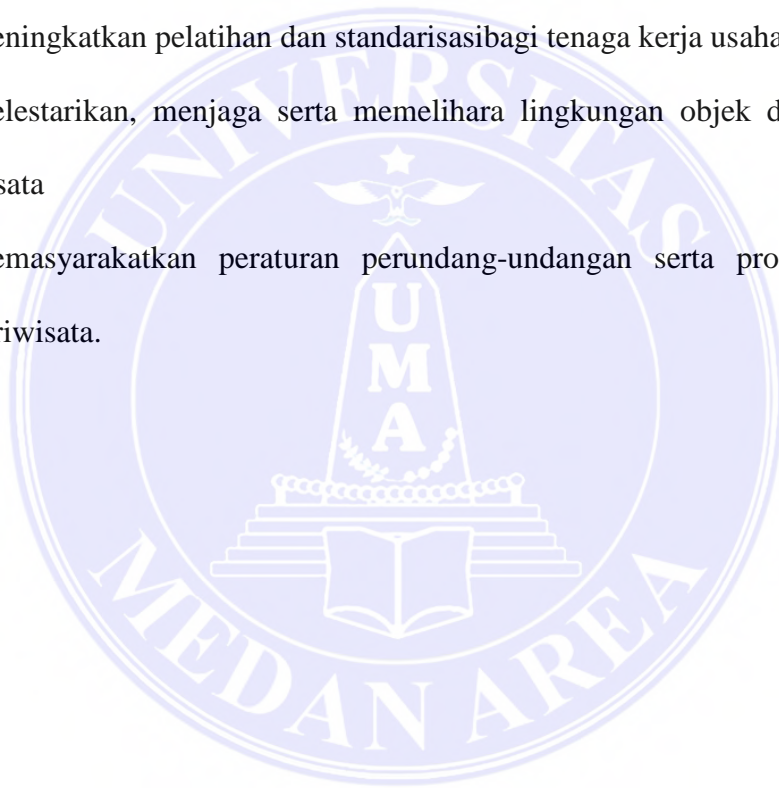
Berdasarkan Visi dan Misi maka ditetapkan tujuan Pembangunan Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

1. Meningkatnya keterampilan, kewirausahaan, kemandirian dan kepeloporan serta partisipasi pemuda dan pembangunan bangsa dan negara yang dilandasi dengan Iman dan Taqwa.
2. Melindungi hasil-hasil kebudayaan Kabupaten Batu Bara yang bersumber dari warisan leluhur guna mendukung pembangunan seni dan budaya daerah
3. Menetapkan dan mengembangkan promosi pariwisata yang efektif dengan pendekatan profesional kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
4. Meningkatkan pengembangan destinasi wisatawan sehingga menjadi daerah tujuan wisata yang atraktif dengan pendekatan profesional kemitraan antara Pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat serta pelaku budaya pariwisata secara harmonis di dalam maupun di luar negeri yang berkaitan dengan bidang penelitian, Sumber Daya Manusia dan kelembagaan.

Sasaran

1. Meningkatkan promosi untuk menarik wisatawan mancanegara maupun nusantara

2. Meningkatkan koordinasi dengan organisasi profesi, asosiasi dan instansi terkait
3. Memberikan pelayanan prima
4. Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM
5. Meningkatkan pelayanan informasi
6. Meningkatkan pendekatan kemasyarakatan melalui sosialisasi sadar wisata
7. Meningkatkan pelatihan dan standarisasi bagi tenaga kerja usaha pariwisata
8. Melestarikan, menjaga serta memelihara lingkungan objek dan daya tarik wisata
9. Memasyarakatkan peraturan perundang-undangan serta program-program pariwisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Edward III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta Bandung.
- Danim, Sudarman, 2002, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Pendit, NS. 1999, *Ilmu Pariwisata : Sebuah Pengantar Perdana*. Cetakan Keenam. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.
- Pitana, Igdanl Ketut S.D. 2009, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta
- Pemerintah Kabupaten Batu Bara, 2010. Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Pemuda Olahraga Kabupaten Batu Bara Kabupaten Batu Bara Tahun 2013-2018.
- Suwantoro, G, 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Offset, Andi Offset, Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Yoeti, H.O. 1997, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Paramita, Jakarta

Sumber online :

1. <https://batubarakab.bps.go.id>
2. <https://batubarakab.go.id>

